

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki iklim dan kondisi kesuburan tanah yang sangat potensial untuk mendukung pertanian, karena memiliki beragam flora dan fauna. Penduduk Indonesia banyak yang bekerja pada sektor pertanian yang tersebar diberbagai daerah karena Indonesia merupakan negara agraris. Apabila dikelola dengan tepat akan menjadikan Indonesia maju, inovatif dan berkelanjutan dalam bidang pertanian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 13,14% pada tahun 2017 atau merupakan urutan kedua setelah sektor industri pengolahan. Salah satu subsektor yang cukup besar potensinya adalah subsektor perkebunan. Kontribusi subsektor perkebunan dalam PDB yaitu sekitar 3,47% pada tahun 2017 atau merupakan urutan pertama di sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian. Subsektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa.

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan tanaman tropis penghasil minyak nabati yang paling produktif dan ekonomis dibandingkan dengan minyak nabati lain. Keistimewaan minyak kelapa sawit dapat diolah lebih lanjut menjadi kebutuhan pangan seperti minyak goreng, margarin, lemak dan lain-lain. Minyak kelapa sawit juga dapat memenuhi kebutuhan non pangan seperti sabun, detergen, dan lain-lain. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait perkebunan kelapa sawit dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat, penyerapan tenaga kerja, dan sumber devisa negara. Subsektor pembangunan perkebunan secara garis besar mempunyai tujuan untuk

meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat yang dihadapkan dengan berbagai tantangan pembangunan pertanian dimasa mendatang yang kompleks, seperti jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Pembangunan ekonomi tidak hanya menciptakan pertumbuhan juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan. Peningkatan pendapatan dapat juga terdistribusi diseluruh kalangan bukan hanya dinikmati sekelompok masyarakat saja, sehingga dengan adanya pembangunan pertanian diharapkan para petani dapat sejahtera (Todaro, 2004). PELITA II digariskan adanya 5 tujuan pembangunan pertanian, yaitu: a. Pengadaan pangan yang cukup dalam lingkungan harga pangan yang mantap yang terjangkau oleh konsumen lemah maupun merangsang produsen petani kecil, b. Peningkatan kemampuan ekonomi para petani produsen sektor pertanian, c. Peningkatan hasil devisa, d. Peningkatan produktivitas dan kelestarian pemanfaatan sumber-sumber alam, serta e. Perluasan kesempatan kerja pertanian dan pedesaan. Untuk mencapai lima tujuan itu, ditetapkan strategi bahwa pembagian pendapatan yang lebih merata, baik antara perorangan maupun antar wilayah, akan lebih diutamakan dari pada kegiatan pembangunan yang berakibat meningkatnya laju pendapatan saja (Sajogyo, 1982).

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi penyumbang komoditi perkebunan di Indonesia. Sebagian besar penduduk Provinsi Jambi tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencarian utama pada sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit yang dapat meningkatkan ekonomi daerah. Adapun luas areal, produksi dan jumlah petani kelapa sawit di Provinsi Jambi dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018

Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
2014	436.034	977.799	200.991
2015	459.960	1.013.811	206.787
2016	467.573	1.010.393	210.684
2017	497.994	1.123.329	212.833
2018	506.462	1.142.078	221.711
Rata-rata	473.604	1.053.482	210.601

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan meskipun produksi pada tahun 2016 mengalami penurunan. Sementara itu jumlah rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya pada komoditi kelapa sawit sebanyak 221.711 KK pada tahun 2018. Meningkatnya luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit, maka hal ini akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, terutama masyarakat yang mengusahakan komoditi kelapa sawit.

Perkebunan sawit di Provinsi Jambi tersebar di seluruh kabupaten, yaitu Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kerinci. Kabupaten Tebo adalah salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi, yang memiliki luas areal ke empat setelah Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Merangin. Kabupaten Tebo menyumbang 11,87% total luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat dengan jumlah petani sebanyak 18 ribu Kepala Keluarga (Lampiran 1). Pada tahun 2014, tercatat 36.792 ha luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tebo dengan produksi 78.076 ton dan meningkat pada tahun 2018 dengan luas 60.128 ha dengan produksi 129.185 ton (Lampiran 2).

Usaha perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu mata pencaharian pokok di Kabupaten Tebo, dimana Kecamatan Rimbo Bujang merupakan kecamatan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar ke enam dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Mengenai data luas areal produksi dan Jumlah Petani kelapa sawit tercatat 4.488 ha luas areal perkebunan dan produksi 15.777 ton (Lampiran 3). Pola perkebunan yang diusahakan merupakan pola perkebunan swadaya. Adapun pengembangan luas areal produksi dan produktivitas di Kecamatan Rimbo Bujang dapat dilihat Tabel 2.

Tabel 2. Luas Areal Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2014 - 2018

Tahun	Luas Areal (ha)			Jumlah (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha)
	TBM	TM	TTM			
2014	476	463	-	939	1.934	4.177
2015	449	505	-	954	2.018	3.996
2016	440	523	23	986	2.057	3.933
2017	369	4.024	42	4.435	15.761	3.917
2018	379	4.054	55	4.488	15.777	3.892
Rata-rata	422	1.913	76	2.360	7.509	3.983

Keterangan :

-TBM(Tanaman Belum Menghasilkan)

-TM(Tanaman Menghasilkan)

-TTM(Tanaman Tidak Menghasilkan)

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa luas areal perkebunan sawit di Kecamatan Rimbo Bujang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Demikian juga dengan produksi kelapa sawit yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan luas areal di Kecamatan Rimbo Bujang mengalami pertumbuhan rata-rata 88,98% setiap tahunnya. Perkembangan produksi di Kecamatan Rimbo Bujang mengalami pertumbuhan rata-rata 168,145%. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu perkebunan yang dibudidayakan hampir di setiap desa,

sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat di desa tersebut. Semakin luas lahan perkebunan kelapa sawit maka akan mempengaruhi pendapatan petani.

Pembangunan perkebunan rakyat dilaksanakan melalui beberapa pola, antara lain pola plasma dan pola swadaya. Petani plasma adalah petani yang mengelola sendiri dan memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Pola plasma dalam mengelola kebun sawit lebih baik dibandingkan petani mandiri lantaran petani plasma ada kerjasama dengan perusahaan inti. Petani swadaya merupakan petani yang membudidayakan kelapa sawit mandiri tidak memiliki kemitraan dengan pihak lain, sumber pendanaan dan pengelolaan sendiri, tidak terikat dengan pabrik manapun, tidak mendapat pendampingan dalam teknik budidaya yang benar sehingga kualitas dan kuantitas masih diragukan.

Pola pikir masyarakat juga mempengaruhi dalam pendistribusian pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik kebutuhan pangan maupun non pangan sehingga terjadi ketimpangan pendapatan pada petani kelapa sawit pola swadaya. Berdasarkan penelitian Rizky Anugrah Pratama Putra menyatakan rata-rata pendapatan usahatani kelapa sawit untuk pola plasma sebesar Rp 29.873.936/ha/tahun dan total biaya sebesar Rp 16.589.355/ha/tahun. Untuk usahatani kelapa sawit pola swadaya rata-rata pendapatan usahatani kelapa sawit sebesar Rp 22.456.318/ha/tahun dan total biaya sebesar 15.028.142/ha/tahun.

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan mengidentifikasi proses yang salah dalam pembangunan ekonomi disuatu daerah terutama pedesaan. Apabila perekonomian itu berjalan dengan baik, maka hasil

dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dinikmati secara adil dan merata bagi seluruh pelaku ekonomi (petani). Perbaikan struktur sosial, kelembagaan dan perilaku masyarakat merupakan komponen terpenting serta dapat mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan.

Transmigrasi Rimbo Bujang dibuka pada tahun 1976 yang terdiri dari 13 desa dan diantaranya terdapat 8 desa yang masuk Kecamatan Rimbo Bujang, 4 desa masuk Kecamatan Rimbo Ulu dan 1 desa masuk Kecamatan Rimbo Ilir. Transmigrasi Rimbo Bujang mendapatkan luas lahan seluas 5 ha dalam 1 tempat. Pada awal transmigrasi lahan tersebut di peruntukkan sebagai tanaman pangan. Sekitar tahun 1980-an dibuka PTPN VI di Kabupaten Tebo dan sebagian wilayahnya masuk Kabupaten Bungo. Pembukaan PTPN VI mengawali kerjasama dengan transmigrasi Rimbo Bujang untuk membangun perkebunan karet pada tahun 1983. Pada tahun 1990-an PTPN VI membuka perkebunan kelapa sawit dan mendirikan pabrik kelapa sawit. Setelah dibukanya pabrik kelapa sawit dan harga yang lebih tinggi menyebabkan petani pada tahun 2000-an mengganti tanaman karet menjadi kelapa sawit. Pada tahun 2017 luas areal sawit di Kecamatan Rimbo Bujang 4.435 ha meningkat sebesar 350% dari tahun 2016. Perubahan fungsi lahan dari karet ke sawit ini didasarkan pada perkebunan karet yang sudah tua atau rusak dan melihat prospek sawit yang bagus. Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Distribusi Pendapatan Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Ketimpangan pembagian pendapatan termasuk fenomena sosial ekonomi di daerah pedesaan. Pertumbuhan pendapatan yang tinggi, harus terdistribusi secara merata pada penduduk agar tidak ada perbedaan kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan, berkurangnya ketimpangan pendapatan merupakan inti dari pembangunan. Selama pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasil dari pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh masyarakat.

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah bagi masyarakat daerah pedesaan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001).

Ketimpangan pendapatan disebabkan oleh adanya penurunan distribusi pendapatan maka akan mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya setiap ada kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan menyebabkan penurunan distribusi pendapatan. Perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sehingga diperlukan usaha dalam pembangunan ekonomi agar tercipta pertumbuhan yang setinggi-tingginya, dan juga menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian yang menganalisis distribusi pendapatan untuk melihat ketimpangan pendapatan usahatani kelapa sawit.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran usahatani kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ?
2. Berapakah besarnya tingkat pendapatan petani kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ?
3. Bagaimana distribusi pendapatan petani kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui gambaran usahatani kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
2. Menganalisis besarnya tingkat pendapatan petani kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
3. Menganalisis distribusi pendapatan petani kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam menentukan kebijakan penawaran komoditas perkebunan khususnya komoditi kelapa sawit.

3. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi lembaga-lembaga penelitian atau instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan kelapa sawit untuk penelitian lebih dalam.